



# LAPORAN PPID TRIWULAN IV

Periode Oktober-Desember

# 2023

Pusat Pengembangan  
Kompetensi Manajemen

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik – Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Triwulan IV Periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sebagaimana menjadi salah satu tugas tambahan dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Pusat. Bentuk kegiatan publikasi yang dilakukan meliputi publikasi secara digital maupun cetak yang menitikberatkan pada capaian kegiatan serta informasi-informasi terkait kegiatan pengembangan kompetensi sehingga khalayak selain dapat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan juga ke depan dapat tertarik dan turut serta dalam mengikuti kegiatan dimaksud.

Pada laporan yang telah tersusun ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Petugas Layanan Informasi dalam melakukan penyajian informasi, kinerja dan peran Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan SDM - Kementerian PUPR dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM PUPR melalui pelayanan informasi bagi publik.

Jakarta, Desember 2023

Pengarah PPID Daerah Tipe I  
Kepala Pusbangkom Manajemen



Ir. Moeh. Adam, MM  
NIP. 196503031992031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1.    Latar Belakang .....	6
1.2.    Maksud dan Tujuan.....	7
<b>BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>8</b>
2.1.    Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP .....	8
2.2.    Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP .....	9
2.3.    Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik .....	12
2.4.    Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik .....	16
2.5.    Kondisi Layanan Informasi Publik.....	23
2.6.    Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik.....	30
<b>BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui e-PPID.....	13
Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui e-PPID BPSDM .....	13
Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui R. Layanan Informasi .....	13
Tabel 4 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID PUPR .....	14
Tabel 5 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID BPSDM.....	14
Tabel 6 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui R. Layanan Informasi.....	15
Tabel 7 - Status Pelayanan Informasi .....	15

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen .....	9
Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan.....	10
Gambar 3 – Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Media Sosial BPSDM .....	10
Gambar 4 - Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Website BPSDM.....	11
Gambar 5 - Publikasi Informasi melalui X-Banner.....	11
Gambar 6 - Publikasi di TV Corner .....	11
Gambar 7 - Publikasi Informasi di Info Dinding.....	12
Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen .....	16
Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen.....	17
Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020 .....	17
Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020.....	18
Gambar 12 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020.....	18
Gambar 13 - Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen .....	18
Gambar 14 - Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan .....	19
Gambar 15 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen .....	19
Gambar 16 - Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen .....	19
Gambar 17 - SK PPID Pusbangkom Manajemen.....	20
Gambar 18 - SOP PPID.....	20
Gambar 19 - Struktur PPID Pusbangkom Manajemen .....	20
Gambar 20 - Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen .....	20
Gambar 21 - Profil Singkat PPID Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 22 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 23 - Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 24 - Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 25 - Jadwal Petugas Layanan Informasi.....	22
Gambar 26 - Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi.....	22
Gambar 27 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen.....	22
Gambar 28 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020 .....	23
Gambar 29 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019.....	23
Gambar 30 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 24/KPTS/MF/2022 .....	25
Gambar 31 - Ruang Layanan Informasi Publik .....	27
Gambar 32 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik.....	27
Gambar 33 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial.....	28
Gambar 34 - TV Corner .....	28
Gambar 35 - Info Dinding .....	29
Gambar 36 - X-Banner .....	29
Gambar 37 - Alat Dokumentasi .....	29
Gambar 38 - Video Animasi Mengenai Jurnal Infrastruktur .....	30
Gambar 39 - Video Dokumentasi Kegiatan & Pelatihan .....	30
Gambar 40 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Instagram BPSDM .....	33
Gambar 41 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Twitter BPSDM.....	34

Gambar 42 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Facebook BPSDM .....	35
Gambar 43 - Tab Informasi Publik di website BPSDM .....	36
Gambar 44 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM.....	43
Gambar 45 - Pigam dan Sertifikat Penghargaan PPID .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Memasuki era keterbukaan informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun menyampaikan perlunya publikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Publikasi kinerja pemerintah pun ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sehingga tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, pelaksana PPID Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR adalah Bagian Data dan Informasi.

Untuk menjalankan fungsi PPID tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 63/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyampaikan bahwa Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, merupakan PPID BPSDM Daerah Tipe I.

Adapun tugas dari Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I adalah:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelola informasi dan dokumentasi di PPID BPSDM Daerah Tipe I;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
- c. Memberikan arahan kepada pelaksanaan tugas Pelaksanaan PPID BPSDM Daerah Tipe I; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepada Pengarah PPID BPSDM.

Sedangkan jenis pelayanan informasi Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I yang diberikan kepada publik adalah:

- a. Informasi Pelatihan: meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).
- b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan: meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);
- c. Informasi Kinerja: Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) Triwulan II Periode April-Juni Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman stakeholders terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajemen di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pelaporan kepada PPID Pusat BPSDM.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tugas, fungsi, program dan kegiatan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen kepada Pegawai Kementerian PUPR dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), masyarakat umum, kalangan akademisi, dan pers;
- b. Meningkatnya pengetahuan stakeholders terkait mengenai Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
- c. Melengkapi kebutuhan data PPID Pusat BPSDM; dan
- d. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP**

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018 tentang SAKIP yang menjadi acuan Pusbangkom Manajemen untuk mempublikasi informasi terutama capaian kinerja dari Pusbangkom Manajemen.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 24/KPTS/KM/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 24/KPTS/MF/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 84/KPTS/MF/2021 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Adapun beberapa tugas dari PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing - masing unit organisasi (unor);
- b. Menyediakan Dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- c. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi pada unor terkait;
- d. Membantu PPID Pusat dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- e. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Pusat.

Sedangkan jenis pelayanan informasi PPID Pusbangkom Manajemen yang diberikan kepada publik adalah:

**a. Informasi Pelatihan**

Meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).

**b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan**

Meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);

**c. Informasi Kinerja**

Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

## 2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Pusbangkom Manajemen antara lain :

### 2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen yang terletak di Gedung Pusbangkom Manajemen Lantai 1 sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk keterangan detail akan diuraikan pada subbab 2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.

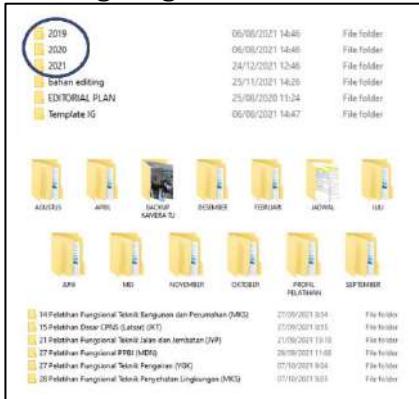
### 2.2.2. Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara rutin mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka dari itu, peliputan dan pendokumentasian sangat di perlukan guna pelaporan kepada pimpinan dan publikasi. Peliputan dan pendokumentasian meliputi pengambilan foto dan pengumpulan data kegiatan.



Gambar 1- Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen

Hasil pendokumentasian diarsipkan secara digital dalam bentuk folder dan diklasifikasikan sesuai tahun, bulan, dan tanggal kegiatan berlangsung.

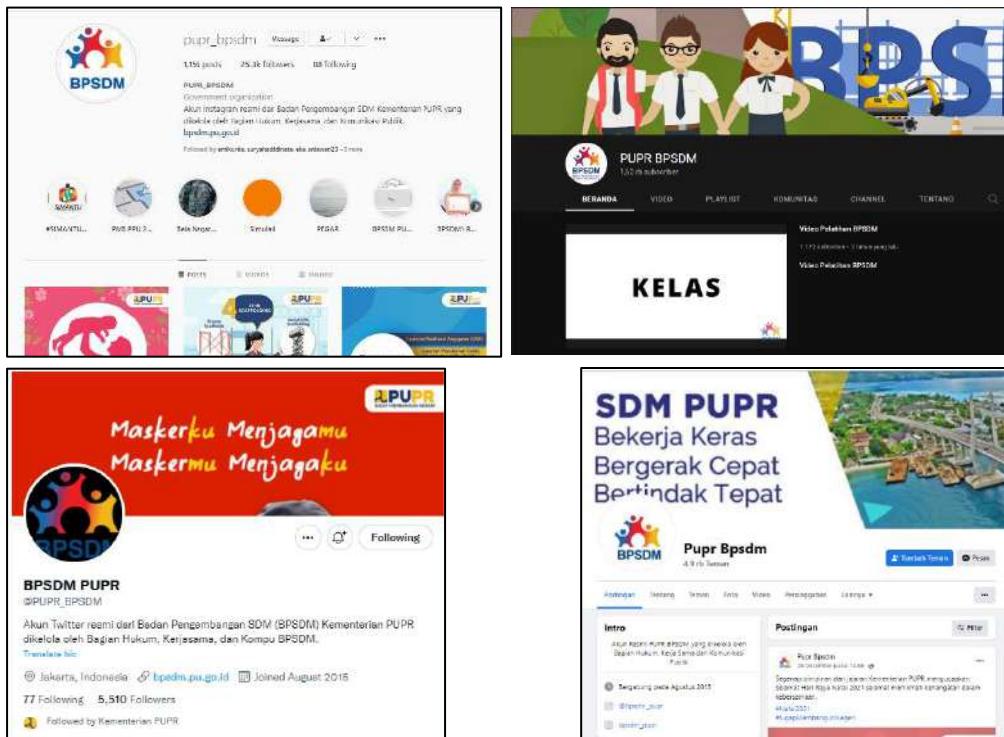


Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan

### 2.2.3. Publikasi Produk Pusbangkom Manajamen

Hasil peliputan dan produk-produk Pusbangkom Manajemen biasanya dipublikasikan melalui kanal-kanal media sosial Pusbangkom Manajemen atau media informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik media cetak maupun digital. Namun dengan terbitnya Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor 08/SE/SJ/2021 tentang Pengelolaan Platform Digital di Kementerian PUPR, mengharuskan Pusbangkom Manajemen menutup seluruh media sosial. Sehingga publikasi kegiatan langsung dikirimkan ke PPID Utama di BPSDM. Kanal-kanal yang digunakan, antara lain:

#### a. Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube)



Gambar 3 – Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Media Sosial BPSDM

b. Website



Gambar 4 - Publikasi Pusbangkom Manajemen Melalui Website BPSDM

c. X-Banner



Gambar 5 - Publikasi Informasi melalui X-Banner

d. TV Corner



Gambar 6 - Publikasi di TV Corner

e. InDing (Info Dinding)



Gambar 7 - Publikasi Informasi di Info Dinding

## 2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

### 2.3.1. Jumlah Pemohon Informasi

Sebelumnya, ada beberapa media yang digunakan Pusbangkom Manajemen untuk layanan permohonan informasi, diantaranya melalui Instagram (Kolom komentar dan Direct Message), Aplikasi Instant Messaging (WhatsApp), dan secara langsung di Ruang Layanan Informasi. Namun karena ditutupnya media sosial Pusbangkom Manajemen, saat ini sarana untuk melayani permohonan informasi hanya melalui e-PPID PUPR & BPSDM serta R. Layanan Informasi. Kuantitasnya pun sangat jauh menurun bahkan sama sekai tidak ada. Berikut rinciannya:

#### a. Pemohon Informasi Secara Langsung

Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen dibuka sejak September 2019 dan telah melayani secara langsung pemohon informasi pada hari dan jam kerja. Jam operasional Ruang Layanan Informasi kami, dari pukul 09.00-11.00 dan 13.00-15.00 WIB. Tetapi, di luar jam tersebut kami tetap melayani permohonan informasi hingga batas waktu jam kerja selesai.

Dikarenakan pandemik COVID-19 maka mobilitas masyarakat pun dibatasi sehingga jumlah pemohon melalui R. Layanan Informasi sangat sedikit.

### 2.3.2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait Pusbangkom Manajemen:

#### a. E-PPID PUPR

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui e-PPID

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui e-PPID PUPR tidak ada sama sekali.

#### b. E-PPID BPSDM

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	1	100%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		1	100%

Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui e-PPID BPSDM

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui e-PPID BPSDM sebanyak 1 dari kategori Perseorangan.

#### c. Ruang Layanan Informasi

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui R. Layanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa selama periode laporan ini dibuat tidak ada permohonan informasi dari media manapun.

### 2.3.3. Jumlah Permintaan Informasi

Permintaan informasi di Pusbangkom Manajemen dibagi menjadi beberapa topik informasi, yaitu terkait Pendidikan, Pelatihan, Penugasan Widya Iswara, dan informasi Lain-lain.

#### a. E-PPID PUPR

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Karir	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 4 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID PUPR

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa tidak ada sama sekali melalui e-PPID PUPR.

#### b. E-PPID BPSDM

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	10%
2.	Pelatihan	1	60%
3.	Karir	0	10%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	20%
Jumlah		1	100%

Tabel 5 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui e-PPID BPSDM

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa permohonan informasi didominasi kategori Pelatihan sebanyak 1 permohonan melalui e-PPID BPSDM.

### c. Ruang Layanan Informasi

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	0	0%
3.	Penugasan Widyaaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	0	0%
5.	Lain-lain	0	0%
Jumlah		0	0%

Tabel 6 - Jumlah Topik Permohonan Informasi Melalui R. Layanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa selama periode laporan ini dibuat tidak ada permohonan informasi dari media manapun.

### 2.3.4. Status Pelayanan Informasi

Media	Status	Jumlah	Persentase
e-PPID PUPR	Dipenuhi	0	0%
e-PPID BPSDM		1	100%
R. Layanan Informasi		0	0%

Tabel 7 - Status Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi terbanyak melalui E-PPID BPSDM.

### 2.3.5. Rata-rata Waktu Pelayanan

Permohonan informasi publik Pusbangkom Manajemen baik melalui Ruang Layanan Publik, e-PPID PUPR, dan e-PPID BPSDM adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.30 WIB.

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

### 2.3.6. Informasi/Data yang Diminta Pemohon

Permohonan informasi di Pusbangkom Manajemen biasanya di dominasi topik lain-lain yang lebih tepatnya mengenai Pelatihan dan Jabatan Fungsional.

### 2.3.7. Media Permintaan Informasi

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, Pusbangkom Manajemen sebelumnya menyediakan beberapa media yang bisa digunakan pemohon, yaitu media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube), Ruang Layanan Informasi, dan Pesan Singkat. Namun, terbitnya SE yang telah dijelaskan sebelumnya mengharuskan Pusbangkom Manajemen menutup semua sosial media sehingga sarana yang tersedia yaitu, Ruang Layanan Informasi, e-PPID PUPR, dan e-PPID BPSDM.

### 2.3.8. Jumlah Sengketa Informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusbangkom Manajemen.

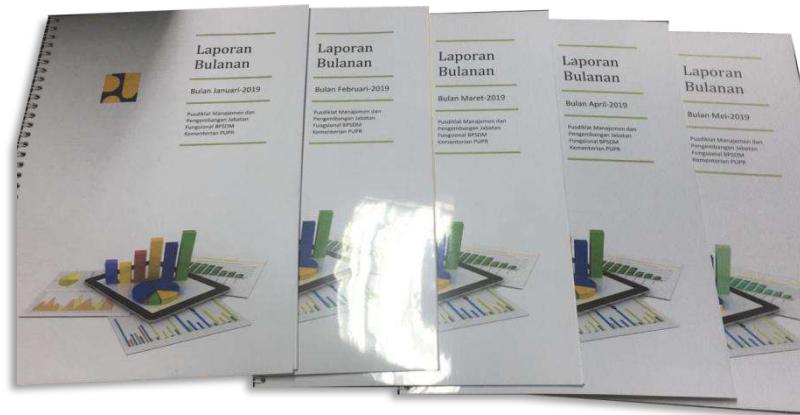
## 2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

### a. Informasi Berkala dan Setiap Saat

Pusbangkom Manajemen menyediakan informasi berkala mengenai Laporan Bulanan terkini, Laporan Kinerja organisasi, Laporan PPID per-Triwulan, Profil Kerja, serta Struktur Organisasi, dan Daftar Pejabat, dll. Informasi-informasi tersebut dipublikasikan melalui Website BPSDM dan PUPR.

#### 1. Laporan Bulanan

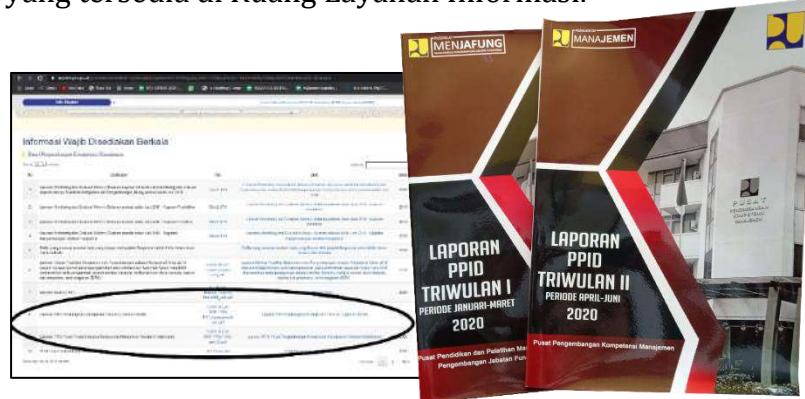
Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen diterbitkan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya disediakan dan dipublikasi dalam bentuk digital. Selain dimuat dalam halaman *website* e-SAKIP yang dikelola oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), juga dapat diakses di *website* BPSDM halaman PPID BPSDM Daerah.



Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen

## 2. Laporan PPID per-Triwulan

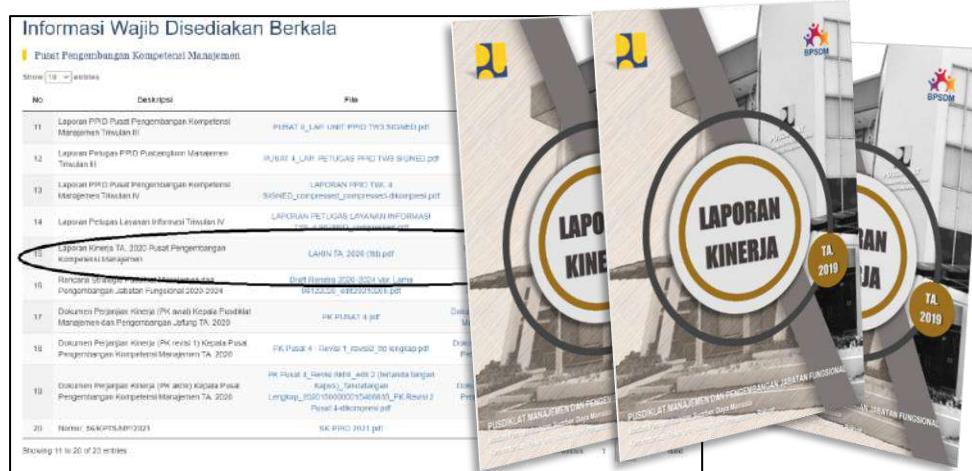
Laporan PPID Pusbangkom Manajemen di disediakan per-Triwulan dan disediakan dalam bentuk digital melalui *website* BPSDM.pu.go.id dan cetak yang tersedia di Ruang Layanan Informasi.



Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen

## 3. Laporan Kinerja

Pusbangkom Manajemen menyediakan Laporan Kinerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

#### 4. Profil Kerja Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen menyediakan Profil Kerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di website PSDM.



Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

#### 5. Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat

Pusbangkom Manajemen menyediakan Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat dalam bentuk digital yang bisa di akses di website PSDM.



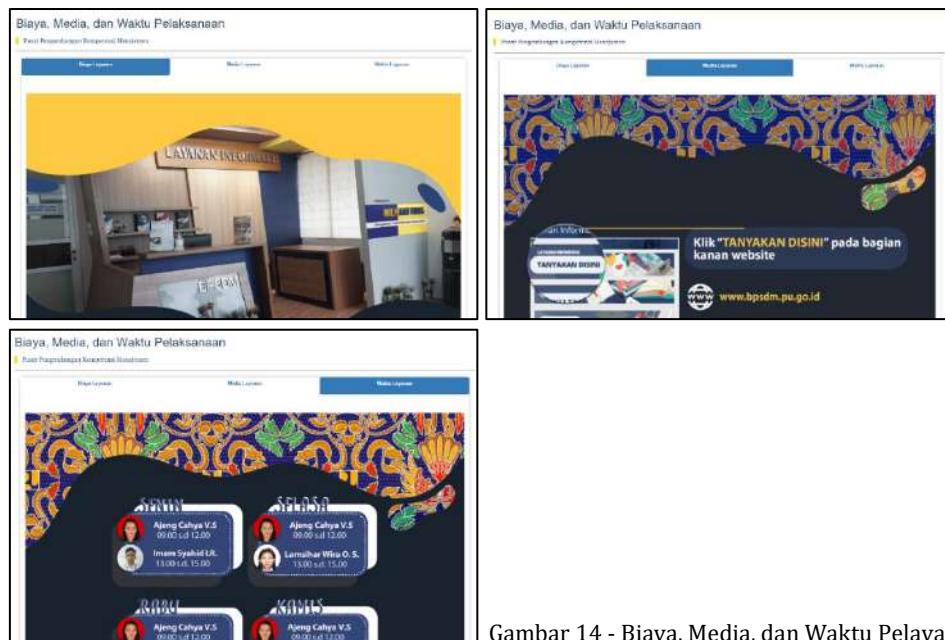
Gambar 12 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

#### 6. Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 13 - Dasar Hukum PPID Pusbangkom Manajemen

## 7. Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan



Gambar 14 - Biaya, Media, dan Waktu Pelayanan

## 8. Produk Hukum Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat					
No	Deskripsi	File	Link	Uraian	Tahun
1	Ajensi Pengembangan Manajemen	Acara KAPITEN Seluruh PUSDM.pdf	Ajensi Pengembangan Manajemen	2020	
2	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Management	MDM 13002.42.4 Pusbangkom Manajemen.pdf	Pusbangkom Manajemen untuk Pusbangkom Management	2020	
3	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Manajemen	MDM 13002.42.4 Pusbangkom Manajemen.pdf	Pusbangkom Manajemen untuk Pusbangkom Manajemen	2019	
4	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Manajemen	MDM 13002.42.4 Pusbangkom Manajemen.pdf	Pusbangkom Manajemen untuk Pusbangkom Manajemen	2019	
5	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Manajemen	MDM 13002.42.4 Pusbangkom Manajemen.pdf	Pusbangkom Manajemen untuk Pusbangkom Manajemen	2019	
6	SK Pengelolaan Tenaga Kependidikan dan Pusbangkom Manajemen	SK 1401.pdf	SK Pengelolaan Tenaga Kependidikan dan Pusbangkom Manajemen	2019	
7	Kemampuan Pengetahuan Pusbangkom Manajemen	Apabila persyaratan terpenuhi (NTD).pdf	Kemampuan Pengetahuan Pusbangkom Manajemen	2019	
8	SK Tanda Penerimaan Pusbangkom	SK 1401.pdf	SK Tanda Penerimaan Pusbangkom	2019	
9	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Manajemen	MDM 13002.42.4 Pusbangkom Manajemen.pdf	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Manajemen	2019	
10	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Manajemen	MDM 13002.42.4 Pusbangkom Manajemen.pdf	Persyaratan Kepesertaan untuk Pusbangkom Manajemen	2019	

Gambar 15 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen

## 9. Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Disediakan Berkala					
Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen					
No	Deskripsi	File	Link	Tahun	
11	Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	STRUKTUR PUSAT 4.pdf	Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen	2021	
23	Profil Pelatihan Bidang Manajemen Kepemimpinan, Konstruksi & Umum	Profil Pelatihan Bidang Manajemen 2020.pdf	Profil Pelatihan Bidang Manajemen Kepemimpinan, Konstruksi & Umum	2020	

Gambar 16 - Profil Pelatihan dan Struktur Pusbangkom Manajemen

## 10. Surat Keputusan PPID Pusbangkom Manajemen

SK PPID BPSDM

Putus Pengembangan Kompetensi Manajemen

File - File Terkait

- Surat Keputusan PPID PUSDIKLAT Manajemen & Pengembangan Jabatan Fungsional  
File Terkait : SK\_PPID\_11.pdf
- SK Tim PPID Pusbangkom Manajemen  
File Terkait : SK\_PPID.pdf
- Surat Keputusan Nomor 56/KPTS/MF/2021 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusbangkom Manajemen  
File Terkait : SK\_PPID\_PUSA/4.2021.pdf
- SK Nomor 84/KPTS/MF/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolda Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 56/KPTS/MF/2021 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen  
File Terkait : SK\_PPID\_84.2021.pdf

Gambar 17 - SK PPID Pusbangkom Manajemen

## 11. Standard Operation Procedure (SOP) PPID Pusbangkom Manajemen

SOP

Putus Pengembangan Kompetensi Manajemen

File - File Terkait

- SOP Input Berita  
File Terkait : SOP Input Berita\_Pusat 4.pdf
- SOP Pelayanan Informasi Publik  
File Terkait : SOP Pelayanan Informasi Publik\_Pusat 4 (1).pdf
- SOP Pemutakhiran Informasi Publik  
File Terkait : SOP Pemutakhiran Informasi Publik\_Pusat 4.pdf
- SOP Pendokumentasiin Informasi Publik  
File Terkait : SOP Pendokumentasiin Informasi Publik\_Pusat 4 (1).pdf
- SOP Pengaduan Pelayanan Publik  
File Terkait : SOP Pengaduan Pelayanan Publik\_Pusat 4.pdf
- Prosedur Pembuatan Poster Informasi  
File Terkait : Prosedur Pembuatan Poster Informasi.pdf
- Prosedur Input Berita Sosial Media  
File Terkait : Prosedur Input Berita Sosial Media.pdf

Gambar 18 - SOP PPID

## 12. Struktur PPID Pusbangkom Manajemen



Gambar 19 - Struktur PPID Pusbangkom Manajemen

## 13. Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen

Tugas dan Fungsi

Putus Pengembangan Kompetensi Manajemen

**LAYARAN INFORMASI**

- Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi/legatian maupun informasi yang ada di Pusbangkom Manajemen
- Membuat dan menyampaikan surat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Diketahui di Pusdiklat Utama;
- Meredakal, duktukar dan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Pusdiklat Manajemen;
- Membantu PPID Utama dalam penyampaian informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan penyelesaian dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama;

Gambar 20 - Tugas dan Fungsi PPID Pusbangkom Manajemen

## 14. Profil Singkat PPIID Pusbagkom Manajemen

## Gambar 21 - Profil Singkat PPID Pusbangkom Manajemen

## 15. Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat				
Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen				
Show 10 entries		Search: <input type="text" value="petugas"/>		
No	Deskripsi	File	Link	Tahun
7	Kompetensi Petugas PPID Pusbangkum Manajemen	<a href="#">Apakah_cermat_mengikuti_register_PPID_utama.pdf</a>	<a href="#">Kompetensi Petugas PPID Pusbangkum Manajemen</a>	2020

Gambar 22 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen

## 16. Maklumat Layanan PPID Pusbangkom Manajemen

Gambar 23 - Maklumat Layanan PPID Pusbangkom  
Manajemen

## 17. Mekanisme Pelayanan PPID Pusbangkomm Manajemen

The image shows a screenshot of a website for 'PUSBANGKOM MANAJEMEN'. The main header features the logo 'PUSBANGKOM MANAJEMEN' and the acronym 'BPSDM'. Below the header, a large banner displays the text 'PPID' in a stylized, glowing font, with 'SYARAT PELAYANAN' underneath. A sub-section titled 'Untuk mengajukan permohonan informasi publik Pusbangkom Manajemen, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:' is visible. To the right, a separate page titled 'Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik' is shown, detailing the process for filing an appeal or complaint regarding information requests.

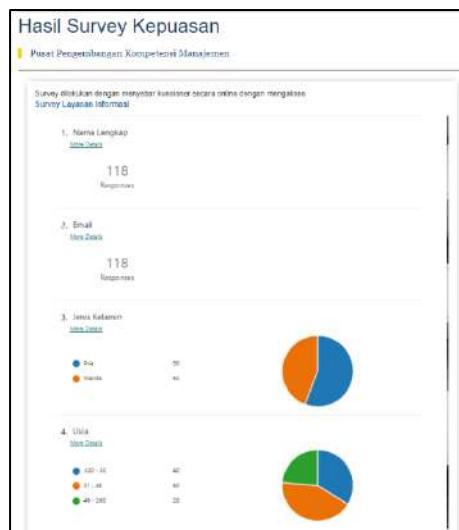
Gambar 24 - Mekanisme Pelayanan PPJD Pushangkom Manajemen

## 18. Jadwal Petugas Layanan Informasi



Gambar 25 - Jadwal Petugas Layanan Informasi

## 19. Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi



Gambar 26 - Hasil Survey Kepuasan Layanan Informasi

## 20. Jadwal Kepala Pusat per-Tahun

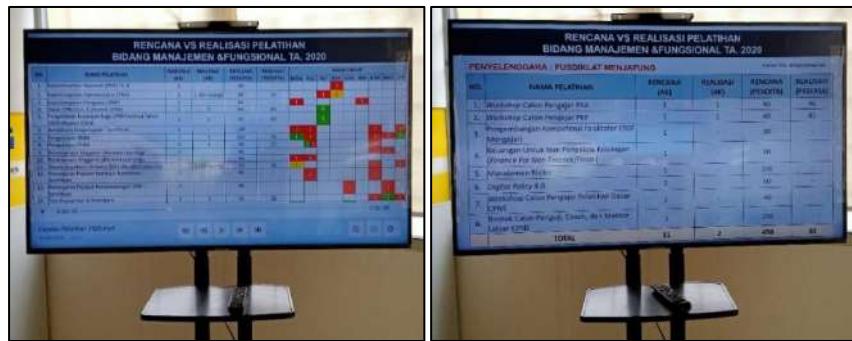
Pada website BPSDM terdapat Jadwal Kepala Pusat per-Tahun secara digital.

TAHUN	PERIODE	NAAMA	PERIODE
2014	01 Januari 2014 - 31 Desember 2014	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2014 - 31 Desember 2014
2015	01 Januari 2015 - 31 Desember 2015	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2015 - 31 Desember 2015
2016	01 Januari 2016 - 31 Desember 2016	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2016 - 31 Desember 2016
2017	01 Januari 2017 - 31 Desember 2017	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2017 - 31 Desember 2017
2018	01 Januari 2018 - 31 Desember 2018	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2018 - 31 Desember 2018
2019	01 Januari 2019 - 31 Desember 2019	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2019 - 31 Desember 2019
2020	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020
2021	01 Januari 2021 - 31 Desember 2021	DR. H. ARIANDI, M.Si.	01 Januari 2021 - 31 Desember 2021

Gambar 27 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen

## 21. Capaian Pelatihan Tahun 2020

Pusbangkom Manajemen menyediakan data mengenai Capaian Pelatihan Tahun 2020 secara digital di TV Corner dalam Ruangan Layanan Informasi.



Gambar 28 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

## b. Informasi Serta Merta

Saat ini, Pusbangkom Manajemen menyediakan informasi serta merta terkait penanggulangan bencana pandemik COVID-19.



## Gambar 29 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019

## 2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik

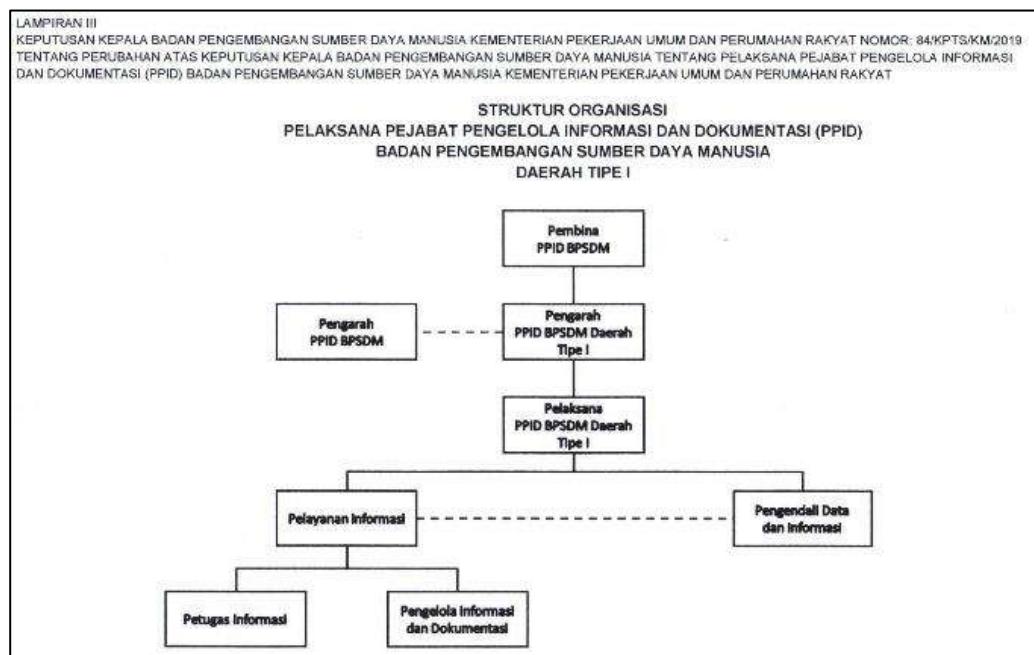
Kondisi layanan informasi publik di Pusbangkom Manajemen meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.

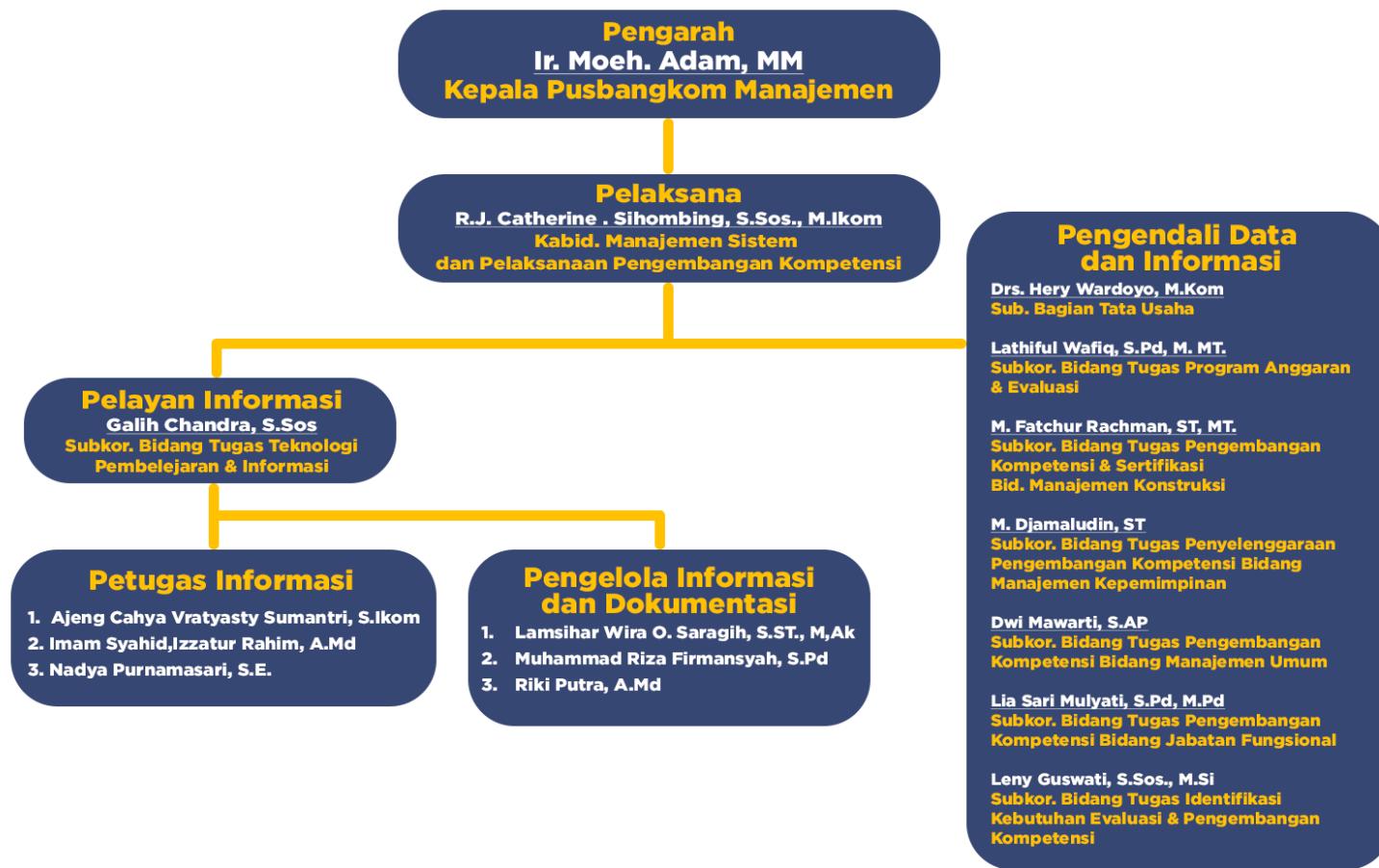
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang saat disusunnya laporan ini telah berubah nomenklatur menjadi Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I yang menyelenggarakan layanan informasi publik secara mandiri, maka dibuatlah organisasi PPID untuk mewujudkan layanan informasi yang memadai.

Pembentukan organisasi PPID dimulai dengan menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 105/KPTS/MF/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian PUPR. Setelah pergantian nomenklatur struktur organisasi internal Pusbangkom Manajemen juga mengalami perubahan. Untuk itu, diterbitkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 84/KPTS/KM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 56//KPTS/KM/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### 2.5.1. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I adalah sebagai berikut:





Gambar 30 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 24/KPTS/MF/2022

Pelaksana PPID Pusbangkom Manajemen dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana Informasi dan 7 (tujuh) orang Pejabat Pengendali Data dan Informasi. Terdapat 1 (satu) orang Pelayan Informasi dan 3 (tiga) Petugas Informasi serta 3 (tiga) orang Pengelola Informasi dan Dokumentasi.s

### **2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik yang memadai, Pusbangkom Manajemen menyediakan beberapa saran dan prasarana yang digunakan, diantaranya:

#### **a. Ruang Layanan Informasi**

Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen terdapat di Gedung Pusbangkom Manajemen Lt. 1 dengan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pemohon informasi. Letak nya yang strategis di dekat pintu masuk Gedung Pusbangkom Manajemen juga mudah untuk diakses pemohon informasi.



Gambar 31 - Ruang Layanan Informasi Publik

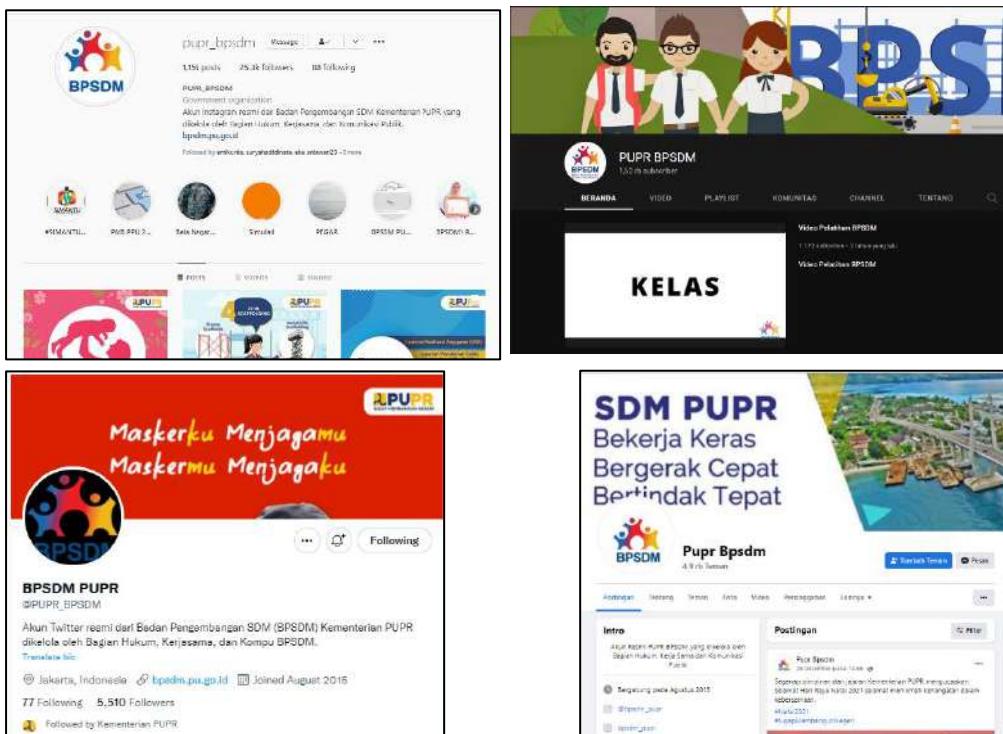


Gambar 32 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik

## b. Media Sosial

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua media sosial Pusbangkom Manajemen telah ditutup. Sehingga semua kegiatan publikasi melalui media sosial dialihkan ke media sosial BPSDM sebagai PPID Utama.

Informasi mengenai kebijakan, pelatihan, pendidikan, dan pencapaian kinerja Pusbangkom Manajemen di publikasikan melalui media sosial tersebut. Berikut tampilan media sosial BPSDM:



Gambar 33 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial

## c. TV Corner

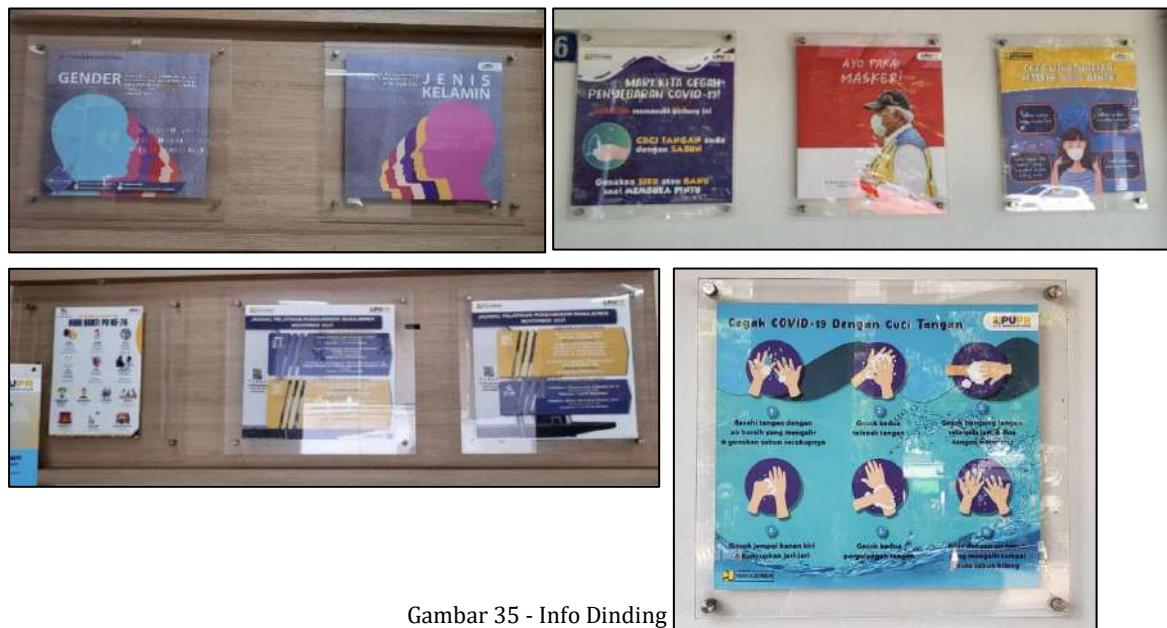
Untuk memberikan informasi secara menghibur dan inovatif, Pusbangkom Manajemen menyediakan media berupa TV di Ruang Layanan Informasi dan ruang tunggu di lobby yang menayangkan materi profil, capaian kinerja, jadwal pelatihan, bahan tayang mengenai jurnal infrastruktur, pengetahuan mengenai DUPAK, dll.



Gambar 34 - TV Corner

#### d. InDing (Info Dinding)

Berlokasi di dekat ruang tunggu lantai 1 Gedung Pusbangkom Manajemen, Info Dinding merupakan salah satu media yang disediakan untuk informasi Pusbangkom Manajemen dalam bentuk poster.



Gambar 35 - Info Dinding

#### e. X-Banner

Untuk menambah media publikasi informasi, Pusbangkom Manajemen juga menyediakan beberapa X-Banner yang berlokasi di Ruang Layanan Informasi, di samping meja resepsionis, dan disamping lift.



Gambar 36 - X-Banner

#### c. Alat Dokumentasi



Gambar 37 - Alat Dokumentasi

## 2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

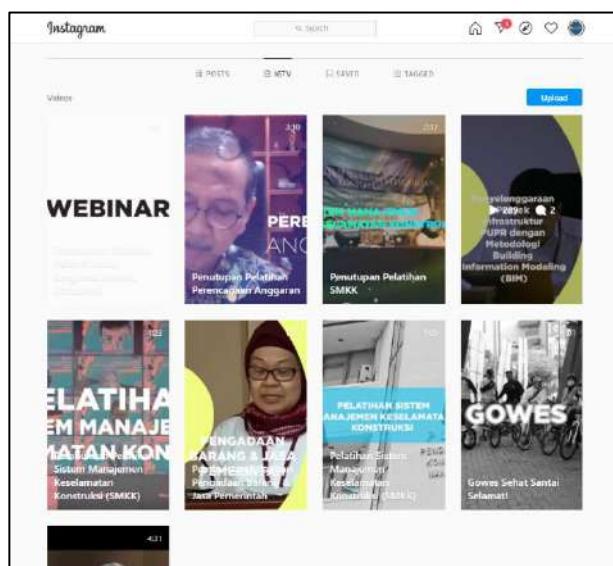
Pusbangkom Manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga melakukan upaya pengembangan inovasi. Hal ini diharapkan selain dapat mempermudah penyampaian informasi juga untuk menarik minat publik untuk mengakses informasi tersebut. Salah satu inovasi dalam bidang pelayanan publik yang dilakukan guna menambah variasi penyampaian informasi adalah melalui video animasi.

### 1. Mengemas Informasi dalam Bentuk Audio-Visual

Pusbangkom Manajemen berusaha mengemas informasi ke dalam video animasi ataupun dokumentasi dalam bentuk video yang menarik dan dilengkapi dengan Voice Over ataupun Caption sehingga mudah di mengerti.



Gambar 38 - Video Animasi Mengenai Jurnal Infrastruktur



Gambar 39 - Video Dokumentasi Kegiatan & Pelatihan

### 2. Memanfaatkan media daring lebih optimal

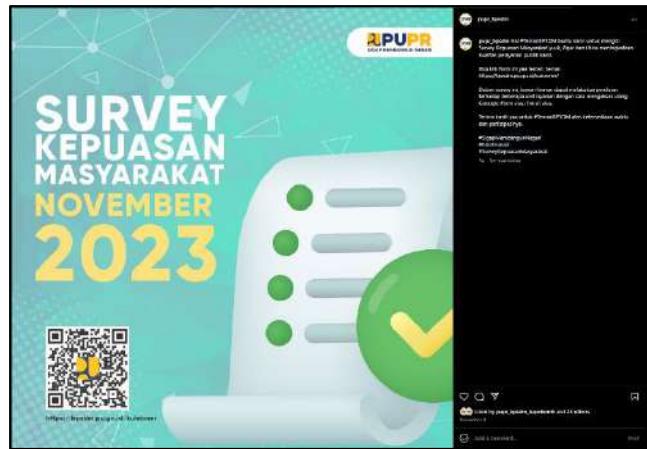
Dalam masa pandemi, pelayanan dan penyebaran informasi secara daring menjadi salah satu cara yang popular. Pusbangkom Manajemen berkoordinasi dengan BPSPM untuk mempublikasikan informasi di media daring BPSPM.

### a. Publikasi Konten Informasi Melalui Media Sosial BPSDM

Pusbangkom Manajemen melakukan pengajuan konten pada link <https://bit.ly/3JheLcC> untuk mempublikasi informasi di media sosial BPSDM. Berikut rinciannya:

- **Instagram**

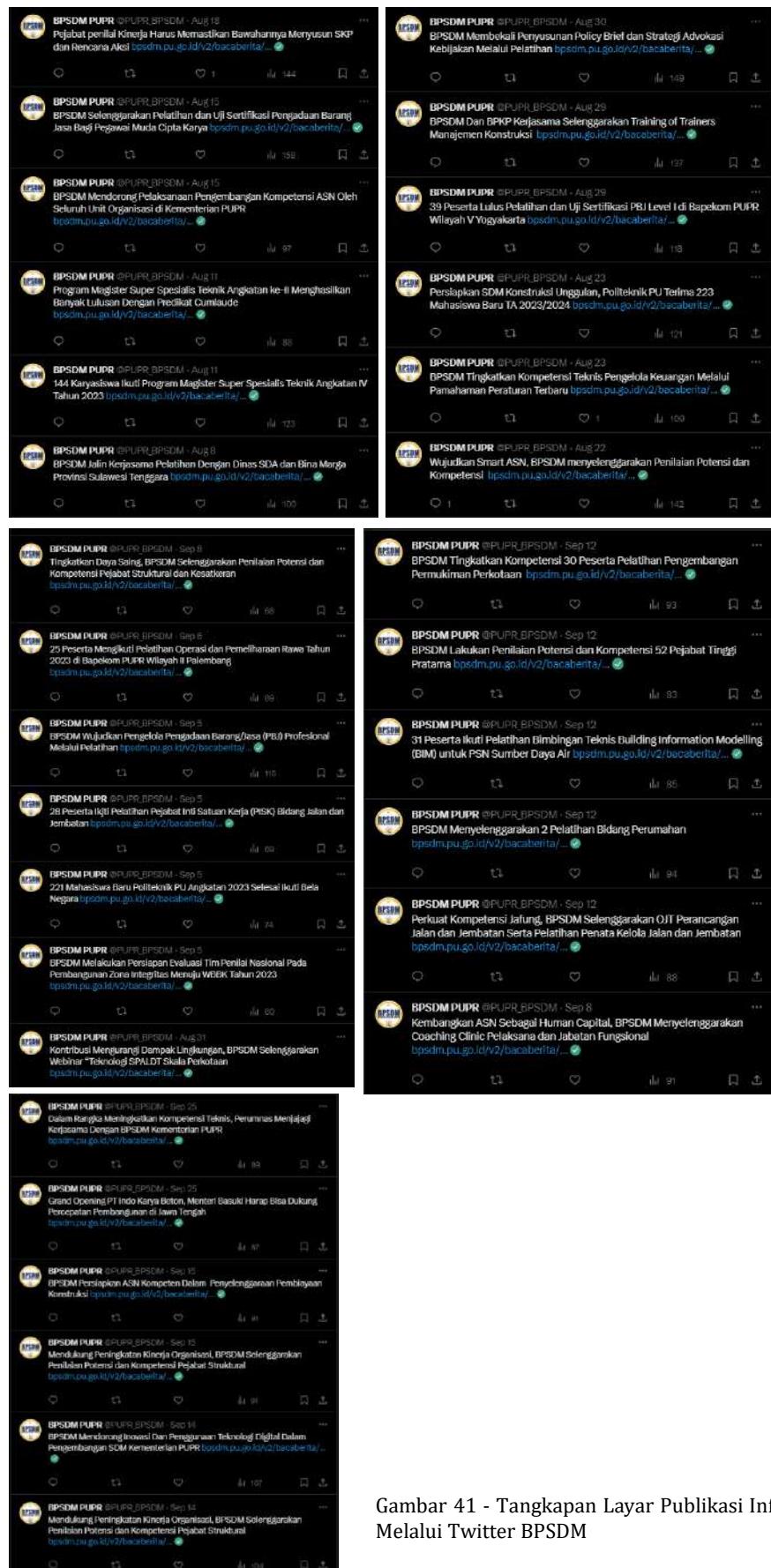






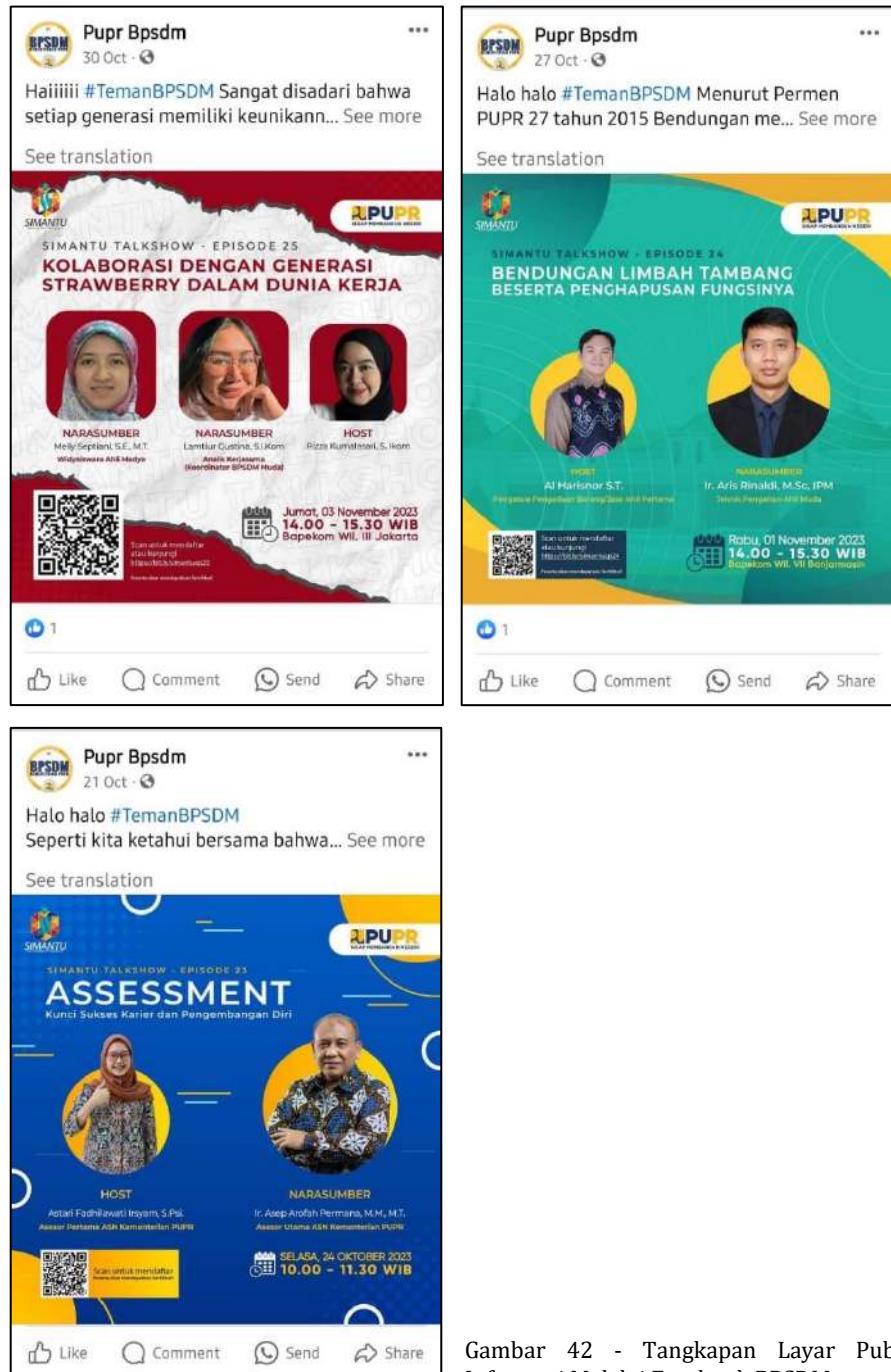
Gambar 40 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Instagram BPSDM

## • Twitter



Gambar 41 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Twitter BPSDM

- Facebook



Gambar 42 - Tangkapan Layar Publikasi Informasi Melalui Facebook BPSDM

**b. Melengkapi Dokumen Terkait Keterbukaan Informasi Publik**

c. Berkontribusi dengan Menulis Beberapa Draft Berita di website BPSDM

# 30 PESERTA LULUS PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS DI BAPEKOM PUPR WILAYAH III JAKARTA

04 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 678

Jakarta, 04 Oktober 2023 - Pejabat pengawas memiliki peran yang krusial dalam mengarahkan, mengawasi, dan memotivasi tim untuk mencapai hasil yang luar biasa. BPSDM telah membekali pejabat pengawas melalui Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan lebih optimal.

## 38 PESERTA LULUS PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PBJ DI BAPEKOM WILAYAH IV BANDUNG

09 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 444408

Bandung, 18 September 2023 – Sesuai amaran Perpres No. 12 tahun 2021, kegiatan pengadaan barang/jasa harus bersifat inklusif dan tidak berujung semestimate untuk mendapatkan barang/jasa dengan harga termurah, namun juga perlu mempertimbangkan Value for Money. Selain itu juga diamanatkan agar mendorong pengembangan UMKM penjual, mempromosikan perdagangan, serta memudahkan penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan desa dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini diulang oleh Instruksi Menteri PUPR No. 4 Tahun 2022 (tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyalahgunaan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024), bahwa dilakukan pengujian SDM dan Budaya Aksi Korupsi bagi ASN Kementerian PUPR.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Polja, maupun Pejabat Pengadaan yang berkompeten dan berintegritas sangat penting sehingga perlu untuk dikembangkan kompetensinya dan calon-calonnya harus disertifikasi. Sertifikasi PBJ Level-1 menjadi salah satu persyaratan jabatan tersebut sebagai model dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang PBJ secara profesional.

Berdasarkan hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dari Unit Organisasi di Kementerian PUPR pada TA 2023, dibutuhkan pelatihan dan sertifikasi PBJ Level-1 bagi sekitar 568 orang ASN Kementerian PUPR (calon PPK, Polja, maupun Pejabat Pengadaan). Untuk itu Pada TA 2023, direncanakan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi PBJ Level-1 oleh BPSDM sebanyak 21 angkatan baik kelas reguler maupun kelas kerjasama. Salah satunya diselenggarakan pada tanggal 18 September s.d 06 Oktober 2023 melalui Baitul Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung.

Kurikulum pelatihan dan sertifikasi PBJ Level-1 ini berlangsung selama 15 hari secara Blended Learning, yaitu sebanyak 80 JP, masing-masing pelajaran selama 45 Menit, mulai dari tanggal 10 September s.d 06 Oktober 2023. Pelaksanaan dan kegiatan proses belajar mengajar secara online melalui zoom dan atau e-learning serta klasikal dilaksanakan di Baitul Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung. Dari jumlah peserta pelatihan 39 orang peserta, telah dinyatakan LULUS sebanyak 30 orang peserta dan 1 orang tidak lulus mengundurkan diri.

Pelatihan ditutup pada Jumat, 19 September 2023 oleh Sekretaris BPSDM, Achmad Subki. Achmad Subki berpesan kepada seluruh peserta, "Bapak/Ibu yang lulus diharapkan untuk siap dan berkomitmen jika nantinya ditugaskan untuk menjadi PPK, Polja atau Pejabat Pengadaan, mengingat sangat tingginya kebutuhan akan pegawai-pegawai berkompeten dan berintegritas pada jabatan tersebut."

## BPSDM SELESAIKAN PELATIHAN FUNGSIONAL KHUSUS ANALIS KEBIJAKAN DI BAPEKOM PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA

10 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 444372

Yogyakarta, 10 Oktober 2023 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Khusus Analis Kebijakan sebagai upaya untuk pengkajian kompetensi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang diangkat melalui inisiasi dan penyelenggaraan dan jabatan lain sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Lembaga Administrasi Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya Analis Kebijakan Anastasia Ery Retnoastuti menyampaikan apresiasi dan kerjasama yang baik dalam pelatihan ini, dan selama pembelajaran berjalan menerima materi dan yang merasa-rasa sekarang lebih memahami lagi, "Kami berharap bapak ibu sudah siap kendali ke unit kerja masing-masing dan bisa berkerja lebih baik lagi," ujar Anastasia.

"Terimakasih atas kesempatan penyelenggaraan diklat ini, para analis kebijakan sangat beruntung mengikuti diklat ini, khususnya untuk saya sendiri yang sama sekali tidak tahu mengenai analis kebijakan itu seperti apa menjadi mengetahui banyak tentang analis kebijakan," ujar Yusuf Aditya.

Dalam sambutan penutupnya Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen yang diwakili oleh Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Catherine Simboling, menyampaikan, "Melalui pelatihan fungsional ini, peserta diharapkan mampu mengenali dirinya sebagai pejabat fungsional dan mampu menerapkan tugas, peran, dan fungsi kejufungan, untuk mencapai target dan sasaran strategis dalam upaya mendukung kinerja unit organisasi."

Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode Distance Learning melalui zoom meeting dan tanggal 24 September s.d 10 Oktober 2023 dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 102 Jam Pelajaran. Adapun jumlah Peserta Pelatihan Fungsional Khusus Analis Kebijakan Angkatan I (Distance Learning) Tahun 2023 adalah sebanyak 24 orang peserta yang berasal dari unit kerja di Lingkungan Kementerian PUPR.

## BPSDM SELENGGRAKAN WORKSHOP MANAJEMEN RISIKO DI BAPEKOM PUPR WILAYAH VI SURABAYA

11 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 444498

Surabaya, 11 Oktober 2023 – Rilis pasti selalu ada pada semua lini pekerjaan. Tidak terkecuali dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu diperlukan kompetensi untuk mengetahui risiko tersebut agar tidak menjadi halangan yang berarti dalam pencapaian tujuan organisasi. Maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Workshop Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian PUPR di Surabaya pada Rabu (11/10) secara tatap muka.

Pada pidatonya saat membuka kegiatan secara resmi, Moeh Adam, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, menyampaikan, "Setelah mengikuti workshop ini, diharapkan para peserta mampu memerlukan nilai-nilai Manajemen Risiko di Unit Kerjanya, dan mampu transfer ilmu yang diperoleh untuk diberikan kepada pegawai lain. Sehingga tiap-tiap individu menjadi lebih memahami terkait penerapan Manajemen Risiko dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya."

Persepsi mengenai manajemen risiko di lingkungan Kementerian PUPR harus diseragamkan. Sehingga dapat menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian PUPR.

Sebanyak 30 orang peserta akan mengikuti kegiatan selama tiga hari hingga 13 Oktober mendatang. Selama total 26 Jam Pelajaran (JP) para peserta akan diperlukan materi-materi terkait manajemen risiko oleh para pengajar bersertifikasi dan ahli dibidangnya.

## TINGKATKAN DAYA SAING, BPSDM SELENGGERAKAN PELATIHAN FUNGSIONAL PERTAMA PEMBINA JASA KONSTRUKSI

17 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 416

Yogyakarta, 17 Oktober 2023 – Peningkatan daya saing Indonesia secara nasional dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Maka diperlukan tenaga konstruksi yang andal dan teritib peryelenggaraan. Menjawab kebutuhan tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Fungsional Pertama Pembina Jasa Konstruksi pada Selasa (17/10), di Yogyakarta secara tatap muka.

Pentingnya pelatihan ini disampaikan oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud saat membuka pelatihan secara resmi. "Tuntutan sebagai pejabat fungsional sangat besar. Setiap pejabat fungsional harus punya kompetensi yang memadai. Sehingga bisa mendukung keberlanjutan dari organisasi termasuk jabatan fungsional itu sendiri," ujar Nicodemus.

Sesuai dengan perannya sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur, pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai jenjangnya. Sehingga benar-benar mampu membina dan meningkatkan kualitas sumber daya konstruksi.

Hingga 20 Oktober mendatang 28 orang peserta akan menjalani pelatihan dengan total 36 Jam Pelajaran (JP). Pada pelatihan ini akan dilakukan persiapan materi, tanya-jawab, diskusi, praktik penyusunan Sasaran kerja pegawai (SKP), dan seminar.

## 21 PESERTA LULUS UJI DERTIFIKASI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

18 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 580

Makassar, 13 Oktober 2023 – Sebanyak 21 orang peserta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maros berhasil lulus uji sertifikasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Jumat (13/10), di Bapekom PUPR Wilayah VIII Makassar. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pelatihan ini untuk menghasilkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Polka (Kelompok Kerja), maupun Pejabat Pengadaan yang berkompeten dan berintegritas.

Saat menutup pelatihan secara resmi, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh. Adam, menyampaikan harapannya, "Bapak dan Ibu yang telah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi sertifikasi PBJ Level-1 dapat menjalankan tugas PBJ dan memahami dengan baik filosofi dari pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi."

"Tidak sekedar menjalankan tugas pengadaan tetapi memaknai proses sebagai suatu sistem pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan," lanjut Adam.

Setelah menjalani pelatihan sejak 25 September lalu dengan total 73 Jam Pelajaran (JP) tiga orang peserta berhasil meraih predikat peserta terbaik. Terbaik pertama diraih Mirhad Tawakkal, Tina Nuvita meraih terbaik kedua, dan Abdul Rahman Arapiq sebagai terbaik ketiga.

Tina mengungkapkan bagaimana pelatihan ini mengubah cara berpikirnya dalam bekerja, "(Saya) lebih paham tentang pentingnya perencanaan dalam proses pengadaan agar bisa lebih efektif dan efisien."

## 28 PESERTA LULUS PELATIHAN FUNGSIONAL PERTAMA PEMBINA JASA KONSTRUKSI (PJK) AHLI PERTAMA

23 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 540

Yogyakarta, 20 Oktober 2023 – Setelah bejalan sejak 17 Oktober lalu, Pelatihan Fungsional Pertama Pembina Jasa Konstruksi (PJK) Ahli Pertama rampung pada Jumat (20/10) di Yogyakarta. Sebanyak 287 orang peserta berhasil lulus dari pelatihan yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh. Adam, saat menutup pelatihan secara resmi mengingatkan para peserta pada ucapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR harus bekerja cepat, adaptif, dan kolaboratif.

"Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang meliputi pengelolaan sumber daya air, koneksi jalan dan jembatan serta pemerlukan infrastruktur yang layak huni tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selalu setunya para Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi," tegas Adam.

Maka diharapkan para peserta yang lulus dapat menerapkan ilmu yang didapat pada 36 Jam Pelajaran yang telah dijalani. Terlebih untuk para peserta yang berhasil meraih predikat peserta terbaik Irfan Taufiqurrahman dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh sebagai terbaik pertama, Fath Fauzi Muctaha dari Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai terbaik kedua, dan Evita Tantia Sambara dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura sebagai terbaik ketiga.

Menutup pidatonya, Adam juga mengapresiasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta. Karena telah menyelenggarakan pelatihan ini dengan baik dan memfasilitasi pelatihan ini dengan pengajar-pengajar kompeten dan ahli di bidangnya. Sehingga para Jabatan Fungsional PJK yang menjadi peserta dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi mulai dari perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi.

## PENUTUPAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II TAHUN 2023, MENTERI BASUKI: ASN HARUS CEPAT, KOLABORATIF, DAN ADAPTIF

18 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR - 484 dkk

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta pada Rabu (18/10/2023).

Menteri Basuki mengatakan, dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju 2045, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa melakukan perubahan dan percepatan di bidang birokrasi. Karena sekarang sudah bukan jaman lagi pelayanan dari ASN yang mempersulit, tapi harus cepat dan ringkas.

"Semua ASN harus melayani, kurangi nafsu mengatur."

Birokrasi lama ke depan harus cepat, salah satunya dengan digitalisasi. Karena persaingan seluruh bukan antara yang besar dan kecil, tetapi antara yang cepat dan lambat," kata Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki juga menekankan agar ASN ke depan harus kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan kondisi yang kan cepat.

"Kolaboratif is a must. Tidak ada pekerjaan yang bisa di kerjakan hanya oleh satu orang atau satu unit saja, semuanya harus kerja sama. Kita juga harus adaptif karena kondisi berubah cepat, apalagi tahun depan sudah tahun politik kita harus tetep bekerja dengan kondusif," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Menteri Basuki juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang terus memberikan kepercayaan kepada Kementerian PUPR untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional ini.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para widyalewara dan coach yang telah membimbing para peserta hingga dapat menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Kepada para peserta, sekali lagi saya ucapkan selamat, setelah kembali ke tempat kerja harus ada perubahan di kepemimpinan bapak

## 33 PESERTA IKUTI PELATIHAN PELATIHAN DAN UJI SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LEVEL-1

23 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR - 489 dkk

Jakarta, Senin 23 Oktober 2023 – Kementerian PUPR telah melakukan reformasi organisasi, bahwa unit pengadaan barang dan jasa berdiri sendiri, terlepas dari pelaksana atau pemilik dari barang dan jasa yang diadakan. Harapannya agar proses pengadaan menjadi independen dan dijamin akuntabilitasnya.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen yang diwakili oleh Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Catherine Simontong saat membuka Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 Senin (23/10) menyampaikan, "Sertifikasi PBJ Level-1 ini menjadi salah satu persyaratan jabatan tersebut sebagai modal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang PBJ secara profesional."

"Pejabat Penelusur Komitmen (PPK), Pejabat, maupun Pejabat Pengadaan yang berkompeten dan berintegritas sangat penting sehingga perlu untuk dikembangkan kompetensinya dan calon-calonnya harus disertifikasi," ujar Catherine.

Pelatihan dan Uji Sertifikasi ini dilaksanakan dengan pola pelatihan Blended Learning dengan total 80 jam pelajaran. Adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 10 November 2023. Peserta Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 dari 46 orang calon peserta yang di panggil untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi sudah hadir sebanyak 33 orang peserta. Tenaga Pengajar/Narasumber pada Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 ini adalah Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian PUPR.

Adapun materi – materi yang akan didapat peserta pelatihan diantaranya, Building Learning Commitment; Core Values BerAKHLAK dan Manajemen Risiko Dasar; Buleya Anti Korupsi; Overview Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1; Try Out; Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ/P); Perencanaan PBJP Level - 1; Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level - 1; Pengelolaan Kontak PBJP Level - 1; Pengelolaan PBJ secara Sirkuler; Level - 1; Pengantar Manajemen Rantai Pasok/Supply Chain Management (SCM); Panduan Aplikasi Simulasi Try Out; Try Out I; Try Out II; Ujian Sertifikasi.

## 41 ORANG LULUS PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI KERJASAMA DENGAN INSPекторAT JENDERAL

31 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR - 488 443

Palimbang, 27 Oktober 2023 – Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi yang diamanatkan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan mempunyai anell yang cukup dalam penyelenggaraan tugas utama Kementerian PUPR. Terlebih saat ini pembangunan infrastruktur PUPR mempunyai anggaran yang setiap tahunnya terus meningkat dengan rata-rata lebih dari seratus triliun rupiah. Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas consulting dan quality assurance terhadap pelaksanaan kegiatan pada sembilan unit organisasi di bawah Kementerian PUPR, tentunya diharut untuk mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Untuk itu, BPSDM menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Konstruksi Kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 pada tanggal 23 sd. 27 Oktober 2023 secara klasikal di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya dan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palimbang dengan total 41 orang peserta. Adapun 3 peserta terbaik pada pelatihan ini adalah sebagai berikut: terbaik pertama Dedi Tahan Sapuro, S.T., M.Eng. dari Inspektorat I, terbaik kedua Gina Dwi Misigironi, S.E. dari Inspektorat III, terbaik ketiga Lestina Yusnita Dahlia, S.T., M.T. dari Inspektorat III.

Prahasdipta Satya Dwi Koesoemo salah satu peserta menyampaikan pengalamannya saat mengikuti pelatihan yaitu tidak ada pelajaran dan keinginan untuk transfer ilmu kepada yang muda. Prahasdipta merasa bahwa waktu pelatihan selama 5 (lima) hari dirasa cukup walaupun dari materi dirasa cukup.

Sekretaris Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Kepala Bagian Kepengawalan dan Umum Herniasari dalam sambutan penutupnya menyampaikan, "Pengembangan kompetensi auditor dilakukan dengan berpedoman kepada standar kompetensi yang telah ditetapkan BPKP sebagai instansi pembina JKA dan KemenPAN RB selaku instansi pembina ASN serta pengembangan kompetensi auditor juga dicasarkan pada kebutuhan pelaksanaan kebijakan pengawasan yang tentunya dirancang sesuai dengan agenda pengawasan yang disusun setiap tahun."

"Harapan kami adalah pemahaman atas proses bisnis tersebut dapat menjadi dasar pengembangan kompetensi ketekunan lanjut," tambah Herniasari.

## MENDORONG PEMBENTUKAN KARAKTER ASN, BPSDM SEL ENGGARAKAN PELATIHAN DASAR CPNS FORMASI LULUSAN PKN STAN

24 Oktober 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 470

Jakarta, 24 Oktober 2023 - Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu komponen utama birokrasi yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pemerintahan berkelas dunia (world class government) tahun 2024. Untuk itu, para ASN harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Globalisasi dan digitalisasi menuntut ASN untuk menjadi generasi pembelajar atau lifelong learner. Tidak hanya menerima, tetapi juga beradaptasi dan mengikuti perubahan ke arah yang positif.

Kementerian PUPR melalui BPSDM melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Kementerian PUPR Formasi Lulusan PKN STAN Tahun 2023 sebagai upaya upaya untuk mendorong good governance melalui pembentukan karakter para ASN. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta.

Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan secara Blended Learning selama 647 Jam Pelajaran (JP) atau setara 74 Hari Kerja (HK) yang dimulai sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023.

Kegiatan tatap muka dibuka pada Selasa (24/10) oleh Kepala BPSDM Khalawi yang hadir secara langsung pada tempat pelatihan. Khalawi memberikan pemahaman kepada peserta bahwa CPNS PUPR memiliki peran yang tak kalah penting dengan para pegawai yang sudah terlebih dulu hadir dan mengabdikan untuk Kementerian PUPR. Pada sambutannya, Khalawi kembali mengingatkan pesan Menteri PUPR, "Satu hal lain yang sering disampaikan Bapak Menteri yaitu legacy terbaik yang dapat ditinggalkan untuk generasi penerus bukanlah infrastruktur yang sudah dibangun Kementerian PUPR, namun organisasi yang Kredibel dan SDM yang Berani (Berintegritas), Kuat (Kompeten dan Profesional), Berjasa (Inovasi, Improvisasi, Imajinasi) serta Berakhlaikar Karimah (diterima/dibutuhkan dan memberi manfaat untuk banyak orang)."

Pelatihan Dasar CPNS Kementerian PUPR TA 2022 bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS Kementerian PUPR yang dilakukan secara terintegrasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kementerian PUPR Formasi Lulusan PKN STAN Tahun 2023 sebanyak 11 orang peserta dari berbagai Unit organisasi di Kementerian PUPR. Selama pelatihan peserta akan dibimbing oleh Tenaga Pengajar yang terdiri dari Widya Iswara dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## MENUJU CONSTRUCTION 4.0, BPSDM SEL ENGGARAKAN PELATIHAN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

03 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 485

Bandung, 2 November 2023 – Perkembangan teknologi terjadi pada berbagai sektor, termasuk konstruksi. Implementasi Building Information Modelling (BIM) merupakan salah satu wujud perubahan paradigma dari metode membangun konvensional menuju Construction 4.0. Sejalan dengan hal itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas perlu ditingkatkan kompetensinya. Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Penyeinggaraan Projek Infrastruktur Dengan Metodologi BIM pada Komisi 2/11, secara tatap muka dan daring di Bandung.

BIM adalah suatu sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses Design, Construction, Maintenance yang terintegrasi pada pemodelan 3D. Mengingat perlunya hal tersebut maka Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi arahan agar paket tender kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) menggunakan metode BIM.

Saat membuka pelatihan secara resmi, Pit. Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung Sudji mengingatkan pada kebijakan implementasi BIM di Kementerian PUPR tertuang dalam Permen PUPR Nomor 22/PER/1/M/2018. Peraturan tersebut menajukan penggunaan BIM pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2.000m<sup>2</sup> dan diatas 2 lantai. Ujar Sudji.

Sudji juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan dari peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan teknologi BIM.

Sebanyak 35 orang peserta akan mengikuti pelatihan ini hingga 10 November mendatang. Selama 66 Jam Pelajaran para pengajar akan menyampaikan materi Budaya Anti Korupsi, Core Values BerAKHLAK dan Manajemen Risiko Dasar. Implementasi BIM Execution Plan (BEP) serta menerapkannya sebagai bagian dari proses penyediaan informasi berbasis BIM. Kesiapan Pengembangan Kompetensi SDM Konstruksi terkait Implementasi BIM, Overview dan Implementasi BIM, Pengenalan Penggunaan Common Data Environment (CDE) di dalam Pengelolaan Projek Infrastruktur PUPR, Praktik Pemodelan dengan Aplikasi BIM, Seminar, Simulasi Penggunaan CDE di dalam Pengelolaan Projek Infrastruktur PUPR, Studi Kasus, serta Workflow dan Implementasi BIM pada level Kolaborasi dalam Proses Monitoring Projek.

## 3 PELATIHAN DIBUKA SEKALIGUS DI 3 BAPEKOM

07 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 483

Yogyakarta, 6 November 2023 – Tiga pelatihan sekaligus dibuka secara resmi pada Senin (6/11) secara daring. Pelatihan tersebut yakni Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah (BPIP) diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah V Yogyakarta dan Wilayah VII Banjarmasin dan Pelatihan Tata Persuratan yang diselenggarakan Bapekom PUPR Wilayah VI Surabaya.

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendekan pelatihan ini untuk melahirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Bahkan Pelatihan BPIP merupakan salah satu persyaratan jabatan tersebut. Selain itu, agar para 40 orang peserta di Bapekom PUPR Wilayah VI Yogyakarta dan 30 orang peserta di Bapekom PUPR Wilayah VII Banjarmasin dapat menjalani BPIP secara independen dan terjamin akuntabilitasnya.

Saat membuka pelatihan secara resmi, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh. Adam menyampaikan, "Data evaluasi pelaksanaan pelatihan BPIP, Persentase kelulusan ujian secara rata-rata keseluruhan hingga saat ini yaitu sebesar 72%. Dengan persentase kelulusan ujian tertinggi yaitu 97,5%, dan pencapaian nilai ujian tertinggi yaitu skor 100."

Sementara, 40 orang peserta Pelatihan Tata Persuratan juga diimbau oleh Adam, "Arsip merupakan pusat ingatan dan memori peristiwa yang penting dalam suatu organisasi. Ketersediaan arsip secara utuh, akurat dan terpercaya akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi. Buktinya suatu organisasi juga direkam dan dapat dibuktikan melalui arsip."

Hingga 17 November mendatang, para peserta Pelatihan BPIP akan diberikan materi sebanyak 75 Jam Pelajaran (JP). Sedangkan untuk para peserta Pelatihan Tata Persuratan akan menjalani kegiatan hingga 9 November mendatang dengan 40 Jam Pelajaran.

### 35 PESERTA LULUS PELATIHAN PENYELENGGARAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN METODOLOGI BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

11 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 44301

35 Peserta Lulus Pelatihan Penyelegaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM)

Bandung, 10 November 2023 - Implementasi BIM merupakan salah satu wujud perubahan paradigma dan metode membangun konvensional menuju Construction 4.0. Sehingga hal yang perlu diingat agar perubahan tersebut dapat berjalan mulus adalah peningkatan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bisa dan terbiasa memanfaatkan teknologi tersebut.

Dalam rangka pengembangan kompetensi pada sektor konstruksi khususnya bagi ASN, maka telah diselenggarakan Pelatihan BIM, secara blended learning selama 7 (tujuh) hari sejak Kamis 2 November sampai dengan Jumat 10 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang dan semua diikutsertakan lulus.

Adapun 3 orang peserta dengan predikat terbaik diantara mereka adalah: terbaik pertama Kevin Lawyer Christian dari Balai Prasaranra Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan terbaik kedua Dies Oktroyadi dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terbaik ketiga Enan Tua Oenan Sirombing dari Balai Pelestarian Jalan Nasional Sulawesi Tenggara.

Selain satu peserta Kevin Lawyer Christian menyampaikan pengalamannya selama mengikuti pelatihan, "Kebutuhan SDM yang memahami BIM semakin mendesak di lingkungan Kementerian PUPR, dengan kondisi implementasi BIM yang masih terbatas di Indonesia. Pengembangan kompetensi BIM menjadi tantangan bagi setiap pelaksana kegiatan konstruksi. Melalui Pelatihan BIM di Bapekom IV Bandung ini, kami 35 peserta mendapatkan ilmu baru terkait penerapan BIM, dilakukan secara online 2 hari dan offline 5 hari, sehingga mampu menguasai materi implementasi BIM. Materi mencakup: regulasi dan kebijakan, penerapan KAK (BIR) BIM, hingga pengaplikasian CDE, dan peserta pun dapat memahami materi yang disampaikan. Harapannya penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR dapat meningkatkan kesadaran akan pengembangan kompetensi BIM semakin dititikberatkan."

Pelatihan Penyelegaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM) ini ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh Adam mengatakan, "Bapak/Ibu yang telah lulus pelatihan ini mampu memahami penerapan Metodologi Building Information Model (BIM) dalam rangka pengawas dan pengelolaan penyelegaraan infrastruktur dengan metodologi BIM."

### TINGKATKAN KUALITAS KOMPETENSI PENGAJAR, BPSDM ADAKAN TRAINING OF TRAINER (TOT) TEKNIK MENGAJAR

14 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 44302

Bandung, 14 November 2023 – Sebagian besar tenaga pengajar/Widyausaha Utama sudah memasuki masa pensiun. Hal tersebut menyebabkan kurangnya jumlah pengajar di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR mengadakan Training Of Trainer (TOT) Teknik Mengajar Bagi Para Pengajar di Bandung, Selasa (14/11) secara tatap muka.

"Salah satu upaya untuk menutupi kekurangan pengajar adalah kita melibatkan baik itu pejabat struktural (ataupun) fungsional sesuai jenjang menjadi tenaga pengajar kita," ujar Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh Adam saat membuka kegiatan secara resmi.

Sebagai salah satu komponen keberhasilan suatu pelatihan aspek pengajar tentu harus dipastikan kualitas dan ketersedianya. Setiap pengajar/Widyausaha harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik sebagai fasilitator pembelajaran dalam pelatihan. Sehingga peserta meningkatkan kompetensinya sesuai dengan sasaran kompetensi pelatihan tersebut.

Selain itu, diperlukan juga penguasaan kompetensi dalam memfasilitasi suatu kegiatan pembelajaran, yaitu teknik dan metode mengajar. Sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan daya serap materi oleh peserta meningkat.

Diharapkan 21 orang peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mempersiapkan materi-materi dengan baik. Sehingga saat berakhirknya kegiatan pada 16 November mendatang dapat tercipta para pengajar handal yang mampu memaparkan materi pembelajaran interaktif dengan metode dan media pembelajaran yang update dan atraktif.

### 40 ASN IKUTI PELATIHAN HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI KERJASAMA BPSDM DENGAN DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN

21 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 44303

Makassar, 21 November 2023 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa setiap PNS berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya di lingkungan Kementerian PUPR. Untuk mengembangkan kompetensi ASN di daerah, BPSDM melalui Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar bekerjasama dengan

Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan mengadakan Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi di lokasi Selasa (21/11).

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan La Mputo dalam sambutannya pembukaannya menyampaikan, "Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam keberhasilan penyelemparaan pemerintahan dan pembangunan."

"Sosok ASN yang mampu memainkan peran tersebut adalah yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketiahan kepada negara, bermoral dan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa," ujar La Mputo.

Kami berharap bahwa setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari masalah hukum dan mewaspadai kelancaran proyek konstruksi di daerah kita," tambah La Mputo.

Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 November 2023 secara tatap muka. Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 40 orang peserta, yang berasal dari ASN Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Teraga Pengajar pada Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi adalah Widyausaha dan Praktisi terhadap hukum kontrak dari Kementerian PUPR.

Adapun materi yang akan didapat selama pelatihan berlangsung yaitu, Kesiijikan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi; Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi; Penyusunan Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi; Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi; Penyelesaian Kontrak Kerja Konstruksi; Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi; Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi; Studi Kasus - Hukum Kontrak Kerja Konstruksi; dan Seminar - Hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang terdiri dari 49 jam Pelajaran (JP).

## BPSDM MENUTUP PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH DI TIGA BAPEKOM

17 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 398

Yogyakarta, 17 November 2023 – Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah secara resmi ditutup bersamaan di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bapekom PUPR) Wilayah V Yogyakarta, Bapekom Wilayah II Palembang, dan Bapekom Wilayah I Medan pada Jumat (17/11).

Pengalihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang semula hanya tugas administratif menjadi tugas strategis dengan melibatkan pengelola PBJP yang profesional dan permanen. Sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) PBJP yang berkompeten dan amanah sangat dibutuhkan.

Hal tersebut yang akan menjadi tanggungjawab para peserta, khususnya 37 peserta yang lulus di Bapekom Wilayah I Medan, 26 orang lulus di Bapekom Wilayah II Palembang, dan 32 orang peserta lulus di Bapekom V Yogyakarta.

Saat menutup pelatihan secara resmi, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen Moeh. Adam menyampaikan, "Berdasarkan hasil evaluasi sementara penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi PBJ Level-1 pada TA. 2023, tercatat persentase kelulusan ujian secara rata-rata keseluruhan hingga saat ini yaitu sebesar 70%, dengan persentase kelulusan ujian tertinggi yaitu 97,5%, dan pencapaian nilai ujian tertinggi yaitu skor 100. Secara rata-rata terjadi peningkatan kelulusan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 di bawah 35%, dan tahun 2022 sekitar 47%."

Pelatihan diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR melalui Pusbangkom Manajemen. Sejak 30 Oktober lalu, para peserta telah menerima materi-materi terkait selama 75 Jam Pelajaran (JP) baik secara daring hingga tatap muka saat uji sertifikasi. Salah satu peserta, Dimas Eko Saputro dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, beranggapan, "Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang regulasi Pengadaan Barang (Barang/Jasa) beserta bagaimana proses pengadaan barang itu berjalan di pemerintahan. Dengan pengetahuan tersebut kedepannya dapat membantu pekerjaan agar terus sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

## BPSDM BEKERJASAMA ITJEN KEMENTERIAN PUPR SELENGGARAKAN PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DI 2 BAPEKOM

20 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 262

Palembang, 20 November 2023 – Manajemen konstruksi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian semua aspek yang terlibat dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian proyek dengan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya yang optimel, sementara memastikan kualitas dan keselamatan yang tepat. Untuk memperbaiki ilmu pengeluaran tentang manajemen konstruksi BPSDM melalui Bapekom PUPR Wilayah II Palembang dan Bapekom PUPR Wilayah III Jakarta mengadakan pelatihan Manajemen Konstruksi kelas Kerjasama Inspektorat Jenderal di buka Senin (20/11).

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh Adam menyampaikan, "Penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan teritip penyelenggaraan pekerjaan konstruksi."

Pelatihan Manajemen Konstruksi Kerjasama Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan pola pelatihan klasikal dengan total 48 jam pelajaran. Adapun waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 sampai dengan 24 November 2023 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang.

Peserta Pelatihan Manajemen Konstruksi Kerjasama Inspektorat Jenderal diikuti sebanyak 25 orang peserta pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta dan 20 orang peserta pada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang. Tenaga Pengajar/Narasumber pada Pelatihan Manajemen Konstruksi ini adalah Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian PUPR.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengetahui sistem dan tata laksana suatu proyek konstruksi, yang mencakup perencanaan organisasi.

## BPSDM SELENGGARAKAN MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER SUPER SPESIALIS UNTUK PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

29 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR 298

Kab Bandung Barat - Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Perumikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Lokakarya Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Program Magister Super Spesialis Bidang Sumber Daya Air dan Perumikan. Hal itu sebagai tindaklanjut dalam mewujudkan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Lokakarya dilakukan secara hybrid pada Senin, 27 November 2023 di Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Perumikan diwakili Kepala Bidang Manajemen dan Sistem Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (MSPPK) Pusbangkom SDA dan Formulirman Fitri Riandini, dihadiri oleh para Ketua Program Studi PTN Mitra, Unit Organisasi Kementerian PUPR dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Fitri Riandini menyampaikan bahwa tindaklanjut dari Permen PUPR Nomor 2 tahun 2023 melalui Pusbangkom SDAP telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap karyasiswa yang melaksanakan Tugas Ilmiah. Selain memonitor karyasiswa on going secara berkala, juga dilakukan pelaksanaan evaluasi pasca pendidikan terhadap alumni karyasiswa Magister Super Spesialis yang telah kembali bekerja selama lebih dari 1 (satu) tahun sejak kelulusan.

Lebih lanjut Fitri Riandini menambahkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM PUPR untuk menjadi Future Leader yang memenuhi output yang diharapkan sesuai standar kompetensi jabatan dan menguasai teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPSDM PUPR menyelenggarakan program Magister Super Spesialis yang bekerja sama dengan empat Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia, yaitu ITB, UNDIP, UGM, dan ITS. Kerjasama ini bertujuan untuk menghasilkan para ahli yang memiliki kemampuan "super spesialis" untuk menyelesaikan target-target pembangunan infrastruktur saat ini.

Lokakarya menghasilkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian terhadap pengembangan Program Pendidikan Magister Super Spesialis ke depannya, seperti perlunya pengembangan dari sisi kemampuan manajerial karyasiswa (etika, tata krama, problem solving, dll) serta perlunya adanya peran aktif dari Unit Organisasi Pengutus demi kelancaran tugas belajar ke depannya. Hal itu mengingat program Magister Super Spesialis merupakan program yang dirancang untuk membentuk ahli teknis yang spesifik dengan cakupan 60-75% praktik (magang, kurungan lapangan, dll) dan 25-40% teori dan hanya dilaksanakan selama 18 (delapan belas) bulan, sehingga dibutuhkan manajemen waktu yang baik, upaya dan ekstra kerja keras dari para karyasiswa.

## GUNA TERTIBNYA PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI, BPSDM SELENGGARAKAN PELATIHAN HUKUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

28 November 2023 / BPSDM Kementerian PUPR / 307

Jakarta, 27 November 2023 - Untuk memastikan tertibnya penyelenggaraan konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan konstruksi adalah pelaksanaan jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Moeh Adam menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan dalam acara pembukaan Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi, Senin (27/11) di Jakarta.

Adam juga menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, Kementerian PUPR harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan pelaksanaannya.

Pelatihan ini juga sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajibkan setiap Pegawai ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Peserta pada pelatihan ini berjumlah 34 orang yang terdiri dari berbagai Unit Organisasi di Kementerian PUPR. Moeh Adam juga mengungkapkan harapannya terhadap para peserta pelatihan. Para peserta diharapkan mematuhi tata tertib, serius dan disiplin dalam belajar, serta aktif selama kegiatan pembelajaran. Mereka juga dibebaskan dari pekerjaan kantor untuk dapat fokus mengikuti pelatihan.

Pelatihan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi ini menggunakan pola pelatihan secara klasikal 49 jam Pelajaran dari 27 s.d 01 Desember 2023 diiklaskan di Bapekom PUPR Wilayah III Jakarta.

Dalam pembukaan acara turut hadir Kepala Bapel Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta, para pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional, serta para pengajar/fasilitator.

Gambar 44 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM

### **BAB III**

#### **KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam periode bulan Oktober-Desember 2023, Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen perlahan melengkapi seluruh poin daftar informasi yang wajib disediakan melalui website BPSDM dan juga PUPR. Beberapa kendala yang menjadi perhatian kami, antara lain:

- a. Penutupan media sosial Pusbangkom Manajemen yang sebelumnya menjadi salah satu sarana utama pelayanan permohonan informasi publik menyebabkan sedikitnya permohonan yang dilayani; dan
- b. Kurangnya koordinasi terkait perubahan jadwal kegiatan pada beberapa waktu.

Berbagai permasalahan tersebut di atas perlu diatasi dengan rencana tindak lanjut sehingga layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen dapat berjalan secara optimal.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam rangka perbaikan layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen, disusun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu:

- a. Koordinasi dengan PPID Utama mengenai mekanisme permohonan informasi melalui e-PPID; dan
- b. Meningkatkan frekuensi konfirmasi jadwal kegiatan dengan subkoor kegiatan terkait.

Evaluasi kegiatan PPID Pusbangkom Manajemen yang diterjemahkan melalui laporan Triwulan ataupun Tahunan diperuntukkan agar kualitas layanan PPID meningkat. Peningkatan kualitas layanan PPID Pusbangkom Manajemen terlihat dari penghargaan sebagai “Pelaksana PPID Terbaik Tingkat Pusat Tahun 2021”.



Gambar 45 - Pigam dan Sertifikat Penghargaan PPID

Pusbangkom Manajemen